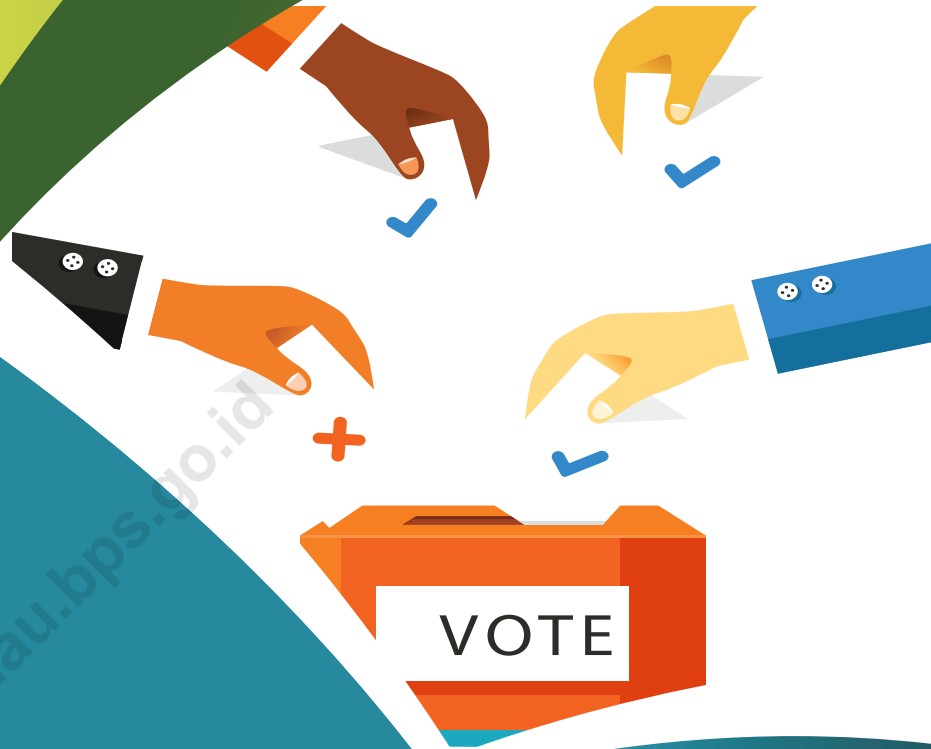


PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2016 - 2017



<https://riau.bps.go.id>



PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2016 - 2017

<http://riau.bps.go.id>



Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2016-2017

ISBN: 978-602-5665-03-5

No. Publikasi : 14520.1807

Katalog BPS : 4601004.14

Ukuran Buku : 17 Cm x 24 Cm

Jumlah Halaman : xii + 48 Halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh

©Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Organisasi Penulisan

Pengarah :

Ir. Aden Gultom, MM

Editor :

Ahmad Azhari, S.Si

Emilia Dharmayanthi, SST

Penulis :

Dwijotulus Saputro, SE

Pengolah Data :

Dwijotulus Saputro, SE

Setting :

Dwijotulus Saputro, SE

<https://riau.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2016-2017 ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau berisi berbagai data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Provinsi Riau, dan merupakan publikasi rutin setiap tahun.

Materi yang disajikan dalam Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2016-2017 ini, terutama didasarkan atas hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang memuat berbagai informasi mengenai indikator-indikator demokrasi yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Provinsi Riau. IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Melalui IDI, keadaan demokrasi di Provinsi Riau relatif dapat digambarkan dengan lebih jelas. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan, terutama di bidang politik.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Pekanbaru, November 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau



Ir. Aden Gultom, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Organisasi Penulisan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Ringkasan Eksekutif	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Perkembangan Demokrasi Global	3
1.2 Urgensi Demokrasi di Indonesia	3
1.2.1 Apa Itu IDI?	4
1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?	5
1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia	6
1.3.1 Kerangka Konseptual IDI	6
1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberties</i>)	7
1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (<i>Political Rights</i>)	8
1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (<i>Institutions of Democracy</i>)	8
1.3.2 Metodologi IDI	10
1.3.2.1 Review Media dan Dokumen	11
1.3.2.2 <i>Focused Group Discussion</i> (FGD)	12
1.3.2.3 <i>Indepth Interview</i>	12
1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi	13
BAB II PROFIL IDI RIAU TAHUN 2016-2017	19

2.1	Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2017	20
2.2	Indeks Kebebasan Sipil	23
2.2.1	Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	25
2.2.2	Variabel Kebebasan Berpendapat	26
2.2.3	Variabel Kebebasan Berkeyakinan	27
2.2.4	Variabel Kebebasan dari Diskriminasi	28
2.3	Indeks Hak-Hak Politik	29
2.3.1	Variabel Hak Memilih dan Dipilih	31
2.3.2	Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	34
2.4	Indeks Lembaga Demokrasi	35
2.4.1	Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil	37
2.4.2	Variabel Peran DPRD	38
2.4.3	Variabel Peran Partai Politik	39
2.4.4	Variabel Peran Birokrasi Pemerintah	40
2.4.5	Variabel Peran Peradilan yang Independen	41
BAB III	KESIMPULAN	45
	DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil ... 24
Tabel 2.2.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 25
Tabel 2.2.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berpendapat 27
Tabel 2.2.4	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkeyakinan 28
Tabel 2.2.5	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan dari Diskriminasi ... 29
Tabel 2.3.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik ... 30
Tabel 2.3.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Hak Memilih dan Dipilih 31
Tabel 2.3.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 34
Tabel 2.4.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi 36
Tabel 2.4.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil 38
Tabel 2.4.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran DPRD 39
Tabel 2.4.4	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Partai Politik 40
Tabel 2.4.5	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Birokrasi Pemerintah 41
Tabel 2.4.6	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Peradilan yang Independen 42

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2009 – 2017	20
Grafik 2.1.2 Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009 – 2017	22
Grafik 2.3.1 Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yang terkait Pemilihan Umum, tahun 2009 dan 2014.....	33
Grafik 2.4.1 Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” yang terkait Pemilihan Umum, tahun 2009 dan 2014.....	37

Ringkasan Eksekutif

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2017 mencapai angka 73,41 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 71,89. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”.

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau dari tahun 2016 ke tahun 2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 10,25 poin (dari 71,78 menjadi 82,03), (2) Hak-Hak Politik yang turun 11,41 poin (dari 77,98 menjadi 66,57), sedangkan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi Naik 11,07 poin (dari 62,34 menjadi 73,41). Pada tahun 2017 terdapat tujuh variabel IDI yang mengalami kenaikan indeks, satu variabel yang mengalami penurunan dan tiga variabel tidak mengalami perubahan. Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, tiga di antaranya mengalami kenaikan cukup tinggi, antara lain : Peran Kebebasan Berpendapat, Peran DPRD, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

Variabel Peran Kebebasan Berpendapat mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 54,15 poin, dari 39,59 pada 2016 menjadi 93,74 pada 2017. Hal ini disebabkan tidak adanya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat di Provinsi Riau sepanjang tahun 2017.

Kenaikan tertinggi kedua terjadi pada variabel Peran DPRD yang naik 29,10 poin, dari 47,96 pada 2016 menjadi 77,06 pada 2017. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya kenaikan tertinggi ketiga sebesar 22,85 poin terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 58,70 pada 2017 dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 35,85. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan menurun cukup tajam sebesar 22,82 poin, dari 80,43 pada 2016 menjadi 57,61 pada 2017 berubah dari kategori “baik” menjadi kategori “buruk”. Selama tahun 2017, di Provinsi Riau banyak terjadi demonstrasi yang bersifat kekerasan. Variabel lain yang tidak mengalami perubahan adalah variabel Hak Memilih dan Dipilih (kategori “sedang”), Pemilu yang Bebas dan Adil (kategori “baik”) dan Peran Peradilan yang Independen (kategori “buruk”).



PENDAHULUAN

<https://riau.bps.go.id>

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia

KOMPONEN IDI TERDIRI ATAS 3 ASPEK, 11 VARIABEL DAN 28 INDIKATOR

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Kebebasan Sipil 	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-Hak Politik 	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
Lembaga Demokrasi 	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator



SKALA KINERJA DEMOKRASI (0-100)

- Kinerja demokrasi "Baik" (Indeks > 80)
- Kinerja demokrasi "Sedang" (Indeks 60 – 80)
- Kinerja demokrasi "Buruk" (Indeks < 60)

1.1 Perkembangan Demokrasi Global

Akhir-akhir ini masyarakat dunia menjadi saksi dua fenomena menarik terkait dengan perkembangan demokrasi global. Pertama, terjadinya gelombang besar demokratisasi yang melanda sejumlah negara yang sebelumnya dikenal tidak bersahabat atau bahkan resisten terhadap ide-ide demokrasi, misalnya negara-negara di kawasan Timur Tengah. Fenomena yang sering disebut sebagai *The Arab Spring* ini telah menurunkan rezim-rezim otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya. Gelombang ini merefleksikan kecenderungan global yang kuat untuk menerima demokrasi sebagai pilihan sistem politik dan pemerintahan yang sah.

Kedua, pada kurun waktu yang sama, banyak negara yang telah melalui proses demokratisasi pada gelombang sebelumnya justru mengalami kemerosotan kualitas demokrasi. Kecenderungan kedua ini membawa sejumlah ahli pada kesimpulan bahwa sedang terjadi resesi demokrasi (*democratic recession*) atau penurunan kualitas demokrasi (*democratic decline*). Penurunan kualitas demokrasi ini merupakan konsekuensi dari lambatnya konsolidasi.

1.2 Urgensi Indeks Demokrasi di Indonesia

Dalam dua dasawarsa terakhir, pengukuran demokrasi menjadi topik hangat di kalangan akademik serta pemerhati dan praktisi pembangunan. Gelombang demokratisasi global telah menjadikan separuh penduduk dunia

kini hidup dalam sistem demokrasi, dengan berbagai variasi pada tataran praktiknya. Oleh karena itu muncul kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana demokratisasi telah berjalan serta melakukan perbandingan antar-negara.

Indonesia, yang menjalani transisi demokrasi besar-besaran, sering disebut sebagai *big bang transition*; juga merasakan kebutuhan ini. Bahkan, dengan variasi antar-daerah yang sangat lebar, kebutuhan ini menjadi sangat terasa. Indonesia perlu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di tingkat daerah karena keberhasilannya sebagai negara demokratis akan sangat tergantung pada sejauh mana demokrasi berkembang dan diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

1.2.1 Apa Itu IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Empat prinsip dasar penyusunan IDI antara lain:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi.
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi.
3. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas.

1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah berakhirnya Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter.

Sekarang, setelah dua puluh tahun berjalan sejak Reformasi, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan memicu *diskursus* di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IDI dibuat dengan provinsi sebagai unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. Pertama, secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang

mempelajari perkembangan demokrasi dan proses demokratisasi di Indonesia, seperti para pengambil kebijakan dibidang politik, pendidikan termasuk mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Keberadaan IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses *deliberasi* perumusan kebijakan dan program pembangunan politik atau proses demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia

Bab ini akan menyajikan konseptualisasi dan kontekstualisasi demokrasi dalam rangka membangun Indeks Demokrasi Indonesia.

1.3.1 Kerangka Konseptual IDI

Secara sederhana, definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek yang dijadikan objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah

Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Kelembagaan Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka Kelembagaan Demokrasi juga dianggap sebagai aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, dalam penyusunan IDI kelembagaan demokrasi didudukkan sebagai aspek ketiga.

1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Secara sederhana, kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, (variabel ke - 1)
- 2) Kebebasan Berpendapat, (variabel ke - 2)

- 3) Kebebasan Berkeyakinan, (variabel ke - 3)
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi, (variabel ke - 4).

Sementara pada tingkat indikator, terdapat 10 (sepuluh) indikator dalam aspek Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari dua indikator pada variabel pertama dan kedua, serta masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat.

1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Political Rights merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap, mencakup partisipasi dan kompetisi. Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih, (variabel ke - 5)
- 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, (variabel ke - 6).

Sementara pada tingkat indikator, aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari lima indikator pada variabel kelima, dan 2 indikator pada variabel keenam.

1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila

beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik.

Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara demokrasi dan anarki adalah karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain didasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama.

Pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara. Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis.

Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil, (variabel ke - 7)
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (variabel ke - 8)
- 3) Peran Partai Politik, (variabel ke - 9)
- 4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, (variabel ke - 10)
- 5) Peran Peradilan yang Independen, (variabel ke - 11).

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sebelas indikator, dengan rincian dua indikator pada variabel ketujuh,

kesembilan, sepuluh, dan sebelas, serta tiga indikator pada variabel kedelapan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, komponen yang membentuk IDI 2017 terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator. Informasi lebih rinci tentang indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3.

1.3.2 Metodologi IDI

Pada tingkat yang paling kongkrit, IDI melalui indikator-indikator dari ketiga aspek penting demokrasi, menilai apakah ada aturan, situasi atau kejadian yang mencerminkan ada atau tidak adanya, berkembang atau terhambatnya demokrasi di suatu provinsi. Kondisi demokrasi di suatu daerah dapat dimanifestasikan dalam berbagai indikator, seperti aturan-aturan yang ada, perilaku masyarakat, dan sebagainya.

Selanjutnya berbagai indikasi keadaan demokrasi ini dapat ditangkap melalui berbagai medium seperti dokumen-dokumen resmi, laporan di media masa (cetak maupun elektronik), serta dalam opini masyarakat yang hidup di tempat itu. Dengan demikian ada berbagai data yang mungkin digunakan untuk menangkap kondisi demokrasi, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif.

Menjawab tantangan metodologis di atas, IDI menggunakan metode Triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Sehubungan dengan itu, ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

review media/telaah media (analisis isi berita surat kabar), *review document* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focused Group Discussion* (FGD) atau diskusi terarah terbatas, dan *indepth interview* (wawancara mendalam).

1.3.2.1 Review Media dan Dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.

Surat kabar atau koran diyakini sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media yang dimaksud adalah surat kabar terkemuka di Provinsi Riau. Sementara untuk jenis dokumen, yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD –seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian dan data pemilih dari KPU.

1.3.2.2 *Focused Group Discussion (FGD)*

Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkau data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah **pertama**, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen.

Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. **Ketiga**, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen.

1.3.2.3 *Indepth Interview*

Pada konteks penyusunan IDI, wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* media dan dokumen serta FGD. Karena itu, *indepth interview* bukan merupakan metode utama dalam proses pengumpulan data melainkan sebagai komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya.

Dengan peran seperti ini, *indepth interview* baru dilakukan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Kendati *indepth interview* bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun

memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam pengumpulan data kualitatif.

Keterkaitan empat metode di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dua metode pertama (*review* media dan dokumen) berperan sebagai basis utama dalam pengumpulan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data kuantitatif melalui *review* media dan dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dikumpulkan melalui dua metode berikutnya (FGD dan *indepth interview*).

1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di Provinsi Riau, digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5).

Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar provinsi yang dihasilkan, skala 0 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu “**baik**” (indeks > 80), “**sedang**” (indeks 60 – 80) dan “**buruk**” (indeks < 60).

Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil

Variabel I : Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Indikator 1

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Indikator 2

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Variabel II : Kebebasan Berpendapat

Indikator 3

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Indikator 4

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Variabel III : Kebebasan Berkeyakinan

Indikator 5

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Indikator 6

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.

Indikator 7

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

Variabel IV: Kebebasan dari Diskriminasi

Indikator 8

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 9

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 10

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-Hak Politik

Variabel V : Hak Memilih dan Dipilih

Indikator 11

Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat.

Indikator 12

Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.

Indikator 13

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Indikator 14

Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*).

Indikator 15

Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi.

Variabel VI : Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Indikator 16

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

Indikator 17

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel VII : Pemilu yang Bebas dan Adil

Indikator 18

Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.

Indikator 19

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Variabel VIII : Peran DPRD

Indikator 20

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Total APBD.

Indikator 21

Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.

Indikator 22

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Variabel IX : Peran Partai Politik

Indikator 23

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.

Indikator 24

Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.

Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

Indikator 25

Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN.

Indikator 26

Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah daerah.

Variabel XI: Peran Peradilan yang Independen

Indikator 27

Keputusan hakim yang kontroversial.

Indikator 28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.



2

PROFIL IDI RIAU

Tahun 2017

<https://riau.bps.go.id>

PROFIL

Demokrasi Indonesia Provinsi Riau TAHUN 2017

IDI PROVINSI RIAU 2017 : 73,41



ASPEK 2017 :



Kebebasan Sipil

82,03



Hak-Hak Politik

66,57



Lembaga Demokrasi

73,41

2 PROFIL IDI RIAU TAHUN 2017

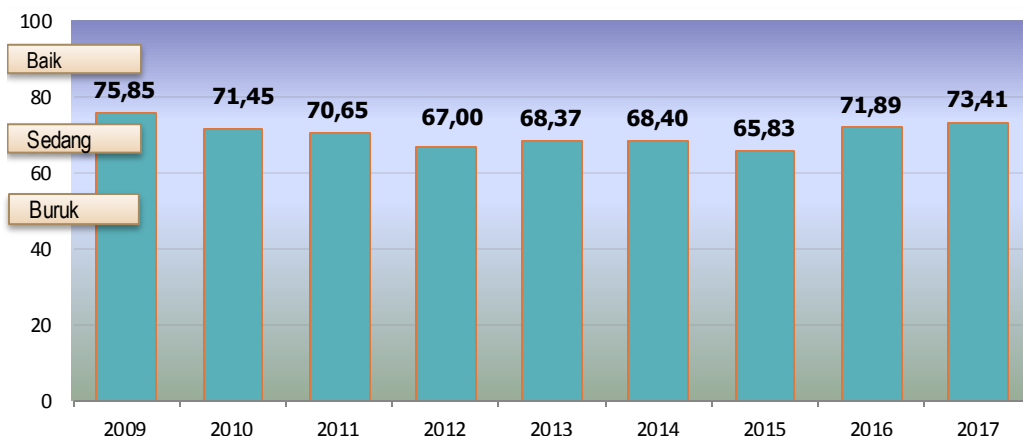
Bab ini menguraikan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2017. Secara berturut-turut akan disampaikan hasil Indeks Provinsi yang merupakan rata-rata capaian Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Indeks Aspek Hak-hak Politik dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi.

2.1 Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2017

Pada tahun 2017, nilai capaian Indeks Demokrasi Provinsi Riau adalah 73,41. Nilai ini merupakan sumbangan dari ketiga aspek yang diukur yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Dalam skala pengukuran IDI yang berkisar dari 0 sampai dengan 100, nilai indeks Provinsi Riau di atas menunjukkan bahwa kualitas kinerja demokrasi di Provinsi Riau masih tergolong “sedang”. Untuk membandingkan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau Tahun 2009-2017, dapat dilihat pada Grafik 2.1.1.

Grafik 2.1.1

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2009-2017



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2017 mencapai 73,41 (dalam skala indeks 0 sampai 100). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2016 yang capaiannya sebesar 71,89. Meskipun cukup banyak mengalami perubahan, Indeks Demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

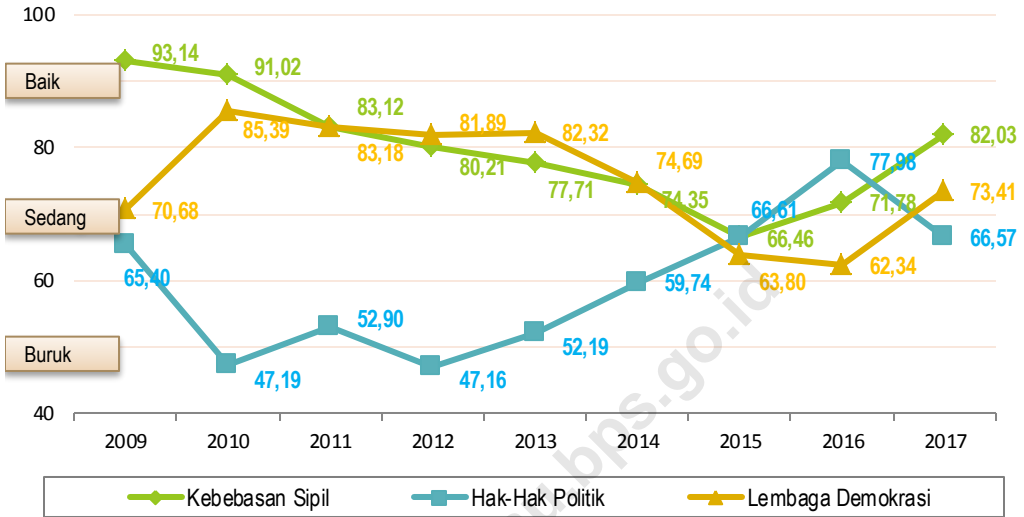
Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula di hitung tahun 2009, capaian IDI Provinsi Riau sebesar 75,85 kemudian angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 67,00 di tahun 2012. IDI Provinsi Riau kemudian mengalami kenaikan hingga sebesar 68,40 pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 65,83 dan kemudian terus mengalami kenaikan dan menjadi sebesar 73,41 di tahun 2017.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Riau. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang di rancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Grafik 2.1.2 menunjukkan sebaran dan perbandingan nilai capaian Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi tahun 2009-2017. Pola sebaran capaian ketiga aspek setiap tahun tidak sama. Pada tahun 2017, Kebebasan Sipil merupakan aspek dengan nilai capaian paling tinggi, diikuti Lembaga Demokrasi dan Hak-Hak Politik.

Grafik 2.1.2

Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009-2017



Capaian aspek Lembaga Demokrasi tahun 2017 sudah mengalami kenaikan dan masih tergolong dalam kategori “sedang”, setelah beberapa tahun sejak tahun 2009 hingga 2016 selalu mengalami penurunan, dan sejak tahun 2014 terjadi penurunan kategori kualitas Lembaga Demokrasi, dari kualitas “baik” menjadi “sedang”. Capaian aspek Kebebasan Sipil tahun 2017 sudah semakin mengalami peningkatan dari kategori “sedang”, menjadi kategori “baik”, sementara capaian aspek Hak-hak Politik tahun 2017 kembali mengalami penurunan dimana sejak tahun 2012 terus mengalami peningkatan dan hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2016 yang hampir mendekati ke kategori “baik”. Penurunan aspek hak-hak politik ini disebabkan oleh meningkatnya demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang mencapai hingga 22,82 poin.

Bila dilihat kecenderungan indeks dalam ketiga aspek, aspek kebebasan sipil mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 71,78 tahun 2016 menjadi 82,03 pada tahun 2017 dan sudah berubah menjadi kategori “baik” walaupun tahun-tahun sebelumnya aspek Kebebasan Sipil dari 93,14 pada tahun 2009 menjadi 66,46 pada tahun 2015. Aspek Hak-Hak Politik justru menunjukkan penurunan yang cukup tajam dari 77,98 pada tahun 2016 menjadi 66,57 pada tahun 2017.

2.2 Indeks Aspek Kebebasan Sipil

Aspek Kebebasan Sipil IDI mengukur kebebasan individu dan kelompok dalam kaitannya dengan kekuasaan negara dan atau kelompok. Dengan kata lain, IDI tidak mengukur tingkat kebebasan individu atau warga negara dari individu atau warga negara lainnya.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil IDI 2017 Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 10,25 poin, dari 71,78 pada tahun 2016 menjadi 82,03 pada tahun 2017, dimana nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sudah berada pada posisi kategori “baik”. Kebebasan sipil tahun 2017 sudah meningkat dimana tahun sebelumnya dari 2009 – 2015 selalu menunjukkan penurunan hingga meluncur ke angka 60, dan sejak tahun 2016 kualitas kinerja aspek Kebebasan Sipil terus mulai meningkat.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil Tahun 2017 dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yaitu: variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” (100,00), “Kebebasan Berpendapat” (93,74), “Kebebasan Berkeyakinan” (78,96), dan “Kebebasan dari Diskriminasi” (78,68). Dibanding IDI 2016, nilai indeks keempat variabel dalam aspek Kebebasan Sipil IDI

2017, semua variabel mengalami peningkatan yaitu Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, variabel Kebebasan Berpendapat, variabel Kebebasan Berkeyakinan, dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi. Namun terdapat satu indikator pada variabel Kebebasan Berkeyakinan yang mengalami penurunan dari 62,50 menjadi 50,00 yakni pada indikator tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.

Tabel 2.2.1 menggambarkan sebaran nilai keempat variabel pada aspek Kebebasan Sipil IDI 2017 serta perbandingannya dengan IDI 2016. Hasil IDI 2017 dibandingkan dengan hasil IDI 2016, capaian nilai indeks aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Riau naik 10,25 poin, dan kenaikan nilai indeks tersebut disumbang oleh meningkatnya variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2,34 poin, variabel Kebebasan berpendapat sebanyak 54,15 poin, variabel kebebasan Berkeyakinan naik 1,27 poin, dan variabel Kebebasan dari diskriminatif naik 17,88 poin.

Tabel 2.2.1
Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil

VARIABEL	2016	2017
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	97,66	100,00
Kebebasan Berpendapat	39,59	93,74
Kebebasan Berkeyakinan	77,69	78,96
Kebebasan dari Diskriminasi	60,80	78,68
Aspek Kebebasan Sipil	71,78	82,03

Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

2.2.1 Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Nilai indeks variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” tahun 2017 sebesar 100,00 disumbang oleh nilai skor dua indikator yang terdapat di dalamnya. Pertama, indikator yang menjelaskan Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Daerah Yang Menghambat Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat dengan nilai 100,00. Kedua, skor indikator yang menjelaskan Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan oleh Warga Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat dengan nilai 100,00.

Tabel 2.2.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

INDIKATOR	2016	2017
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	81,25	100,00
Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	97,66	100,00

Tabel 2.2.2 memperlihatkan nilai indeks variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” di Provinsi Riau mengalami kenaikan menjadi 100,00 pada tahun 2017 dibandingkan dengan skor tahun 2016 yaitu 97,66. Indikator yang

mengalami kenaikan terhadap variabel, adalah indikator Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat sebesar 100,00, sedangkan indikator Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada nilai 100,00.

Dibandingkan tahun 2016, hasil IDI 2017 mengindikasikan perilaku pemerintah daerah yang tetap menggunakan cara-cara berdialog dalam komunikasi mereka dengan masyarakat. Sementara, perilaku masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat tidak mengalami kendala. Artinya, selama tahun 2017 hak kebebasan warga untuk berkumpul dan berserikat tidak mengalami hambatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2.2.2 Variabel Kebebasan Berpendapat

Nilai indeks Variabel "Kebebasan Berpendapat" di Provinsi Riau pada tahun 2017 adalah sebesar 93,74. Dibandingkan dengan IDI 2016, nilai variabel Kebebasan Berpendapat tahun 2017 naik cukup tajam hingga sebesar 54,15 poin, dari 39,59 pada 2016. Kenaikan nilai indeks variabel Kebebasan Berpendapat menggambarkan peningkatan kualitas kinerja variabel dari kinerja kategori "buruk" menjadi kinerja "baik" pada tahun 2017.

Peningkatan nilai tersebut disebabkan oleh nilai skor yang naik pada kedua indikatornya. Indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat mengalami kenaikan sangat tajam sebesar 62,50 poin di mana nilainya pada tahun 2016 sebesar 37,50 menjadi 100,00 pada tahun 2017. Sementara skor indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat yang Menghambat

Kebebasan Berpendapat juga mengalami kenaikan sebesar 12,50 poin dimana nilai tahun 2016 sebesar 50,00 menjadi sebesar 62,50 tahun 2017. Kedua Skor indikator ini yang menyebabkan variabel kebebasan berpendapat berubah menjadi kategori “baik” dapat dilihat pada Tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berpendapat

INDIKATOR	2016	2017
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	37,50	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	50,00	62,50
Variabel Kebebasan Berpendapat	39,59	93,74

Kenaikan nilai variabel Kebebasan Berpendapat yang cukup tajam tersebut mengindikasikan semakin berkurangnya kejadian penggunaan kekerasan baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menghambat pemenuhan hak asasi warga terkait dengan kebebasan berpendapat.

2.2.3 Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Nilai indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 1,27 poin, dari 77,69 pada tahun 2016 menjadi 78,96 pada tahun 2017. Nilai variabel tersebut didukung oleh satu dari tiga skor indikator di dalamnya. Seperti dikemukakan Tabel 2.2.4, peningkatan nilai

indeks dalam variabel ini terjadi akibat naiknya nilai dari satu indikator, dan satu indikator tidak mengalami kenaikan, sementara satu indikator lainnya mengalami penurunan.

Tabel 2.2.4
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berkeyakinan

INDIKATOR	2015	2016
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya	78,26	78,26
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	62,50	50,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	85,00	100,00
Variabel Kebebasan Berkeyakinan	77,69	78,96

2.2.4 Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Dibandingkan hasil IDI 2016, nilai indeks variabel “Kebebasan dari Diskriminasi” di Provinsi Riau pada tahun 2017 cukup mengalami perubahan (lihat Tabel 2.2.5). Nilai variabel tersebut disumbang oleh dua dari tiga indikator di dalamnya.

Pertama, nilai indikator tentang Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya pada tahun 2017 naik tajam sebesar 66,76 poin dibanding dengan IDI tahun 2016. Kedua, nilai indikator Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

masih tetap sebesar 100,00. Ketiga, nilai indikator Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya turun 25 poin dari 100,00 tahun 2016 menjadi 75,00 tahun 2017.

Tabel 2.2.5
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

INDIKATOR	2016	2017
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	0,00	66,76
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	75,00
Variabel Kebebasan dari Diskriminasi	60,80	78,68

2.3 Indeks Aspek Hak-Hak Politik

Nilai indeks aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau sejak tahun 2013 selalu mengalami peningkatan, yakni dari 52,19 tahun 2013, menjadi 59,74 pada tahun 2014, 66,61 tahun 2015 menjadi 77,98 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 66,57 atau turun sebesar 11,41 poin. Penurunan nilai indeks ini di tahun 2017 secara statistik cukup signifikan tetapi masih dalam kategori “sedang”. penurunan ini disebabkan pada variabel VI yakni “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yang nilai indeksnya 57,61 mengalami penurunan sebesar 22,82

poin, dan dapat terlihat jelas pada indikator ke 16 yakni jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan pada tahun 2017 menurun sangat tajam sebesar 45,65 poin dari 60,87 pada tahun 2016 menjadi 15,22 pada tahun 2017. Hal ini menyiratkan bahwa gambaran kualitas pemenuhan hak-hak politik di Riau masih cukup memprihatinkan. Indeks Hak-Hak Politik yang cukup rendah secara umum menyiratkan kemungkinan adanya stagnasi dalam pemenuhan hak-hak politik. Walaupun pada tahun 2016 nilai indeks aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau naik menjadi (77,98) merupakan angka yang paling tinggi dibandingkan dua aspek IDI lainnya. Artinya pemenuhan akan hak-hak politik masyarakat Riau sudah mulai menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2016 tetapi pada tahun 2017 sudah mundur kembali ke tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kategori “buruk”.

Menurunnya nilai indeks Aspek Hak-Hak Politik pada tahun 2017 tersebut disebabkan oleh turunnya nilai indeks salah satu variabel yang ada dalam aspek Hak-Hak Politik, yakni “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yang nilai indeksnya 57,61 atau turun 22,82 poin dan “Hak Memilih dan Dipilih” nilai indeksnya 75,53 atau masih sama dengan tahun sebelumnya (lihat Tabel 2.3.1).

Tabel 2.3.1

Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik

VARIABEL	2016	2017
Hak Memilih dan Dipilih	75,53	75,53
Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	80,43	57,61
Aspek Hak-Hak Politik	77,98	66,57

Di dalam aspek Hak-Hak Politik terdapat dua variabel yakni “Hak Memilih dan Dipilih” yang mempunyai lima indikator dan “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yang mempunyai dua indikator.

2.3.1 Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Nilai indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” di Provinsi Riau pada tahun 2017 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dibanding nilai indeks pada tahun (lihat Tabel 2.3.2).

Tabel 2.3.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih

INDIKATOR	2016	2017
Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat	97,44	97,44
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	68,82	68,82
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	69,48	69,48
Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi	92,31	92,31
Variabel Hak Memilih dan Dipilih	75,53	75,53

Empat dari lima indikator dalam variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yaitu indikator pertama sampai dengan indikator keempat terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun

penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu seperti tahun 2009, data dari empat indikator tersebut merupakan data dari pemilu pada tahun 2014 (perkembangannya lihat Grafik 2.3.1).

Indikator pertama adalah "Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat" dengan skor 97,44 pada tahun 2014, meningkat 3,21 poin dari skor tahun 2009 yaitu 94,23. Artinya kejadian yang menghambat hak memilih dan dipilih masyarakat semakin berkurang.

Indikator kedua adalah "Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih" dengan skor 60,00 pada tahun 2014, meningkat 10 poin dari skor tahun 2009 yaitu 50,00. Artinya, pemerintah dapat memfasilitasi kelompok penyandang cacat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

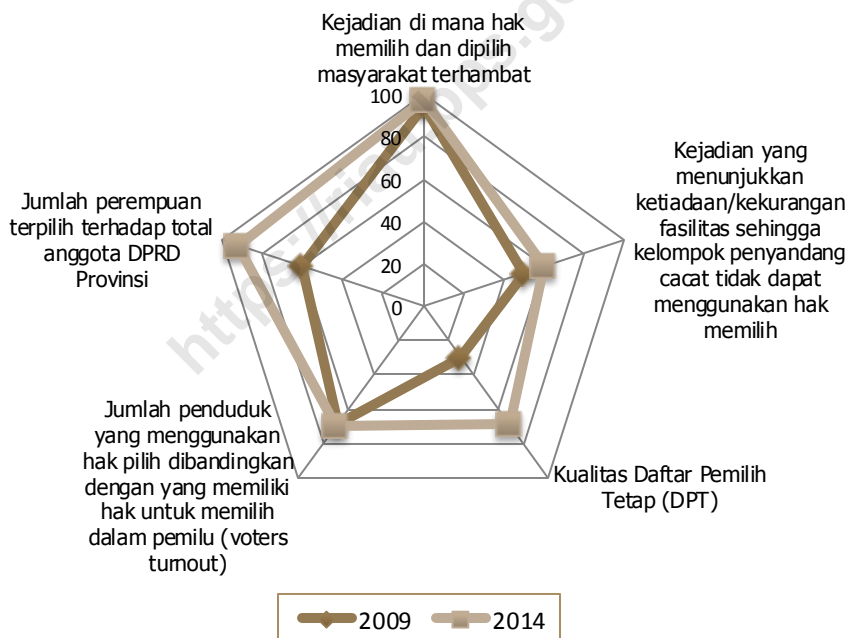
Indikator ketiga adalah "Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)" dengan skor 68,82 pada tahun 2014, meningkat 38,82 poin dari skor tahun 2009 yaitu 30,00. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas DPT di Provinsi Riau berada pada kategori "sedang", namun kualitas DPT Tahun 2014 sudah lebih baik dari kualitas DPT tahun 2009. Peningkatan kualitas DPT tahun 2014 membuat penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik.

Indikator keempat adalah "Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*)" dengan skor 69,48 pada tahun 2014, meningkat 1,37 poin dari skor tahun 2009 yaitu 68,11. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Riau untuk menggunakan hak pilihnya sudah semakin meningkat.

Sedangkan Indikator kelima, yakni "Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi" dengan skor 92,31 pada tahun 2017, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2016. Indikator ini

merupakan indikator yang pengumpulan datanya dilakukan setiap tahun, tidak terkait dengan tahun penyelenggaraan pemilu. Data dikumpulkan dengan mencatat jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi pada tahun observasi. Perubahan dalam jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi terjadi karena adanya Pergantian Antar Waktu (PAW).

Grafik 2.3.1
Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yang
Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2009 dan 2014



2.3.2 Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Nilai indeks variabel "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" pada tahun 2017 yaitu 57,61, mengalami penurunan sebesar 22,82 poin dibandingkan dengan tahun 2016 yang nilainya 80,43 (lihat Tabel 2.3.3). Nilai variabel tersebut dipengaruhi oleh menurunnya nilai salah satu indikator yang terdapat di dalamnya, sedangkan indikator lainnya masih pada posisi yang sama seperti pada tahun 2016.

Dari Tabel 2.3.3 terlihat bahwa penyebab menurunnya nilai indeks untuk variabel "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" adalah turunnya nilai indikator "Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan" sebesar 45,65 poin, dimana nilainya pada tahun 2016 adalah 60,87 dan pada tahun 2017 nilainya menjadi 15,22. Hal ini mengindikasikan semakin bertambahnya jumlah kejadian demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan atau mengarah pada tindak kekerasan.

Tabel 2.3.3

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

INDIKATOR	2016	2017
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	60,87	15,22
Dumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00
Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	80,43	57,61

2.4 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi

Indeks lembaga Demokrasi apabila di lihat dari tahun 2013 sampai tahun 2016 selalu menunjukkan penurunan, namun pada tahun 2017, aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau sudah mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 11,07 poin (dari 62,34 pada tahun 2016 menjadi 73,41 pada tahun 2017), yang artinya capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 menempatkan kinerja aspek ini masih pada kategori "sedang". Kenaikan nilai indeks ini perlu perhatian pemerintah.

Peningkatan nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017, antara lain dapat dijelaskan berdasarkan kontribusi dari nilai indeks masing-masing variabel dan skor indikator pada aspek yang bersangkutan. Secara khusus, bila dicermati distribusi nilai indeks lima variabel pada aspek Lembaga Demokrasi yaitu: "Pemilu yang Bebas dan Adil", "Peran DPRD", "Peran Partai Politik", "Peran Birokrasi Pemerintah", dan "Peran Peradilan Independen", terlihat dengan jelas bahwa ada tiga variabel yang telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 adalah pada indeks variabel "Peran DPRD" naik sebesar 29,10 poin, yaitu dari 47,96 pada tahun 2016 menjadi 77,06 pada tahun 2017, indeks variabel "Peran Partai Politik" naik sebesar 0,78 poin, yaitu 99,22 pada tahun 2016 menjadi 100,00 pada tahun 2017, dan indeks variabel "Peran Birokrasi Pemerintah" naik sebesar 22,85 poin yaitu 35,85 pada tahun 2016 menjadi 58,70 pada tahun 2017 Sedangkan dua variabel lainnya masih di angka yang sama seperti tahun 2016 yakni pada variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, dan variabel Peran Peradilan yang Independen dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1**Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi**

VARIABEL	2016	2017
Pemilu yang Bebas dan Adil	91,14	91,14
Peran DPRD	47,96	77,06
Peran Partai Politik	99,22	100,00
Peran Birokrasi Pemerintah	35,85	58,70
Peran Peradilan yang Independen	50,00	50,00
Aspek Lembaga Demokrasi	62,34	73,41

Merujuk pada Tabel 2.4.1, sedikitnya ada dua poin penting yang menarik untuk digarisbawahi terkait dengan konfigurasi angka-angka indeks variabel pada aspek Lembaga Demokrasi.

Pertama, setelah beberapa tahun aspek Lembaga Demokrasi selalu menunjukkan penurunan hingga tahun 2016, walaupun demikian capaian nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi masih dalam kategori “sedang” dan pada tahun 2017 aspek Lembaga Demokrasi sudah mulai menunjukkan peningkatan ke angka 70, terlihat pada tiga aspek yang terjadi kenaikan yakni Aspek Peran DPRD, aspek Peran Partai Politik, dan aspek Peran Birokrasi Pemerintah.

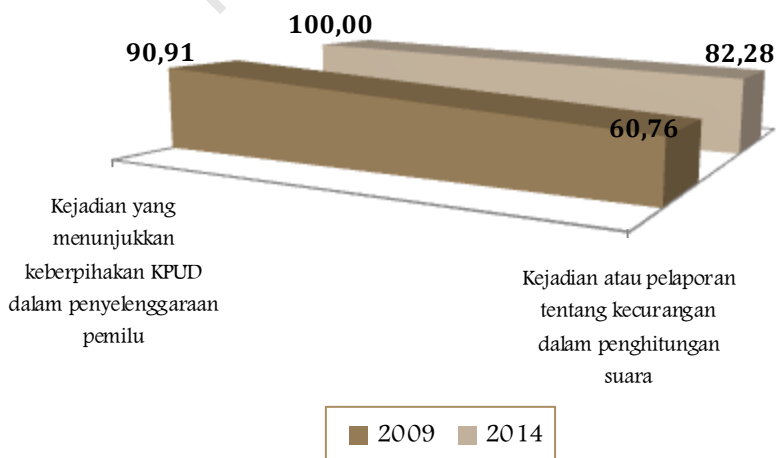
Kedua, dari tiga aspek lembaga Demokrasi yang menunjukkan peningkatan ada dua aspek yang terlihat kenaikan yang sangat signifikan yaitu pertama peran DPRD naik sebesar 29,10 poin yang sebelumnya berada pada kategori “buruk” sekarang sudah pada level kategori “sedang” dan hampir mendekati ke kategori “baik” ini sangat terlihat peningkatan peran DPRD dalam membantu pemerintahan. Kedua aspek peran Birokrasi Pemerintah juga naik sebesar 22,85 poin tetapi masih dalam kategori “buruk”

walaupun demikian telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap fluktuasi capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017.

2.4.1 Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

Nilai indeks dari variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” di Provinsi Riau pada tahun 2017 adalah 91,14. Nilai ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2016. Hal ini dikarenakan variabel ini terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, variabel ini hanya dikumpulkan pada tahun 2009 dan 2014 dengan demikian nilai variabel pemilu yang bebas dan adil 2017 akan sama dengan tahun 2016. Dapat dilihat pada Grafik 2.4.1.

Grafik 2.4.1
Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” yang Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2009 dan 2014



Tabel 2.4.2

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

INDIKATOR	2016	2017
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	82,28	82,28
Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil	91,14	91,14

2.4.2 Variabel Peran DPRD

Nilai indeks variabel "Peran DPRD" di Provinsi Riau dari tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Penyebab meningkatnya nilai indeks variabel "Peran DPRD" pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dalam dimensi kuantitatif, dapat dijelaskan oleh capaian skor tiga indikator, di mana ketiga indikatornya mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.4.3).

Dibandingkan dengan tahun 2016, Indikator yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yaitu meningkat sebanyak 67,86 poin. Kemudian persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan mengalami kenaikan sebesar 25,00 poin, sedangkan kenaikan yang terendah sebesar 19,26 poin terjadi pada indikator alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan.

Tabel 2.4.3**Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran DPRD**

INDIKATOR	2016	2017
Alokasi anggaran pendidikan terhadap total APBD	66,79	86,05
Persentase Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	25,00	50,00
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0,00	67,86
Variabel Peran DPRD	47,96	77,06

2.4.3 Variabel Peran Partai Politik

Nilai indeks variabel "Peran Partai Politik" di Provinsi Riau dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,78 poin (lihat Tabel 2.4.4). Dua indikator yang mempengaruhi kenaikan nilai indeks variabel "Peran Partai Politik" adalah: (a) indikator "Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu" yang pada tahun 2017 keadaan masih sama dengan tahun 2016; (b) indikator "Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi" yang pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,85 poin dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 2.4.4**Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Partai Politik**

INDIKATOR	2016	2017
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00	100,00
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	92,15	100,00
Variabel Peran Partai Politik	99,22	100,00

Capaian kinerja variabel "Peran Partai Politik" pada tahun 2017 masih pada level "baik". Demikian juga capaian kinerja untuk dua indikator yang mempengaruhi variabel "Peran Partai Politik", kedua indikator berada pada level "baik" yaitu indikator "Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu" dan "Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi". Hal ini berarti peran partai politik pada tahun 2017 sudah menunjukkan hasil yang maksimal dalam memberikan pendidikan demokrasi bagi masyarakat.

2.4.4 Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

Nilai indeks dari variabel "Peran Birokrasi Pemerintah" di Provinsi Riau pada tahun 2017 adalah sebesar 58,70, naik sebesar 22,85 poin jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 35,85. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2.4.5.

Tabel 2.4.5
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Birokrasi
Pemerintah

INDIKATOR	2016	2017
Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	28,95	78,95
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41,66	41,66
Variabel Peran Birokrasi Pemerintah	35,85	58,70

Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel “Peran Birokrasi Pemerintah” yaitu: **pertama**, indikator “Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan oleh keputusan PTUN” mengalami kenaikan sebesar 50,00 poin pada tahun 2017, dimana nilai skor indikator pada tahun 2016 adalah 28,95 menjadi 78,95 pada tahun 2017. **Kedua**, indikator “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” masih dalam keadaan yang sama dengan tahun 2016 yakni 41,66.

2.4.5 Variabel Peran Peradilan yang Independen

Nilai indeks dari variabel “Peran Peradilan yang Independen” di Provinsi Riau pada tahun 2017 masih sama dengan tahun 2016, dimana nilai indeks variabel ini pada tahun 2017 adalah 50,00, dan nilai pada tahun 2016 adalah 50,00. nilai indeks ini mengakibatkan variabel “Peran Peradilan yang Independen masih berada pada level “buruk”.

Tabel 2.4.6
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Peradilan yang Independen

INDIKATOR	2016	2017
Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	0,00
Variabel Peran Peradilan yang Independen	50,00	50,00

Pada tahun 2017, nilai dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel peran peradilan yang independen yaitu keputusan hakim yang kontroversial dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi, dan masih memiliki nilai yang sama dengan tahun 2016 yaitu 100 dan 0. Nilai indikator penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi masih tetap pada level 'buruk'.

3

KESIMPULAN

**IDI PROVINSI RIAU 2017 :
73,41**

**Aspek Kebebasan Sipil
82,03**

Variabel I : 100,00

Indikator 1 : 100,00

Indikator 2 : 100,00

Variabel II : 93,74

Indikator 3 : 100,00

Indikator 4 : 62,50

Variabel III : 78,96

Indikator 5 : 78,26

Indikator 6 : 50,00

Indikator 7 : 100,00

Variabel IV : 78,68

Indikator 8 : 66,76

Indikator 9 : 100,00

Indikator 10 : 75,00

Variabel V : 75,53

Indikator 11 : 97,44

Indikator 12 : 60,00

Indikator 13 : 68,82

Indikator 14 : 69,48

Indikator 15 : 92,31

Variabel VI : 57,61

Indikator 16 : 15,22

Indikator 17 : 100,00

Variabel VII : 91,14

Indikator 18 : 100,00

Indikator 19 : 82,28

Variabel VIII : 77,06

Indikator 20 : 86,05

Indikator 21 : 50,00

Indikator 22 : 67,86

Variabel IX : 100,00

Indikator 23 : 100,00

Indikator 24 : 100,00

Variabel X : 58,70

Indikator 25 : 78,95

Indikator 26 : 41,66

Variabel XI : 50,00

Indikator 27 : 100,00

Indikator 28 : 0,00

**Aspek Lembaga Demokrasi
73,41**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2017 mencapai angka 73,41 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 71,89. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori "sedang". Serupa dengan tahun 2016, pada tahun 2017 tidak ada indeks aspek yang berkategori "buruk". Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi masih tetap pada kategori "sedang", sedangkan aspek Kebebasan Sipil berubah menjadi kategori "baik".

Angka IDI 2017 Provinsi Riau merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 82,03; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 66,57; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 73,41. Pada tahun 2017 terdapat tujuh variabel IDI yang mengalami kenaikan indeks, satu variabel yang mengalami penurunan dan tiga variabel tidak mengalami perubahan. Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, tiga di antaranya mengalami kenaikan cukup tinggi, antara lain : Peran Kebebasan Berpendapat, Peran DPRD, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

Dapat dipastikan bahwa naiknya nilai indeks aspek Kebebasan Sipil mencerminkan adanya perbaikan dalam konsolidasi demokrasi di Provinsi Riau. Namun masih terdapat hambatan yang cukup serius, yaitu pada variabel Kebebasan Berkeyakinan, dimana pada indikator tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya, menurun dari kategori

“sedang” menjadi ke kategori “buruk”. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Riau dalam kebebasan berkeyakinan masih dalam tekanan oleh pemerintah setempat. Masyarakat diharuskan menjalankan ajaran agamanya sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, pada tahun 2017 aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau justru menunjukkan indeks yang mengalami penurunan di antara ketiga aspek lainnya. Indeks Hak-Hak Politik masih termasuk dalam kategori “sedang”. Turunnya kinerja indeks Hak-Hak Politik disebabkan meningkatnya demonstrasi yang bersifat mogok/kekerasan di Provinsi Riau. Demonstrasi memang merupakan hak politik rakyat dalam berdemokrasi, namun haruslah dilakukan secara damai karena demonstrasi adalah proses penyampaian aspirasi/ kepentingan rakyat kepada pemerintah.

Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang tertinggi dibandingkan aspek lainnya namun masih dalam kategori “sedang”. Peningkatan ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD. Nilai alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2017 masing-masing sebesar 19,5 persen dan 9,15 persen. Alokasi ini sudah hampir mendekati persentase alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa Pemerintah Provinsi harus mengalokasikan dana APBDnya sebesar 20 Persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. Selain itu, selama tahun 2017, DPRD Provinsi Riau telah mengeluarkan Rekomendasi kepada eksekutif sebanyak 19 rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2014. *Indeks Demokrasi Indonesia: Pedoman Teknis Tata Cara Pengumpulan Data*. Jakarta: BPS.

_____. 2015. *Indeks Demokrasi Indonesia: Petunjuk Teknis Tata Cara Pengumpulan Data*. Jakarta: BPS.

_____. 2013. *Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2014. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2016. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2012 – 2015*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2017. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015 – 2016*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BPS Provinsi Riau
Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru 28 131
Telp. (0761) 23042-21336 Fax : (0761) 21336
E-mail : bps1400@bps.go.id